

2) Pendapatan Retribusi Daerah

31 Desember 2023	31 Desember 2022
49.774.180.383,00	41.460.096.255,00

Anggaran penerimaan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp55.019.090.400,00 dan terealisasi sebesar Rp 49.774.180.383,00 atau 90,47% yang apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp8.314.084.128,00 atau 20,05%. Adapun rincian pendapatan retribusi daerah sebagai berikut.

Tabel 5.1.2 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah

(dalam rupiah)

No	Jenis Penerimaan	OPD Teknis	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022	Selisih Realisasi Tahun 2023 dan 2022	% Selisih dibanding Realisasi 2022
			Anggaran	Realisasi	%			
A	Retribusi Jasa Umum		35.358.530.000,00	37.010.457.075,00	104,67	35.431.171.800,00	1.579.285.275,00	4,46
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	405.625.000,00	362.837.500,00	89,45	252.202.500,00	110.635.000,00	43,87
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Dinas Lingkungan Hidup	17.000.000.000,00	20.215.698.000,00	118,92	18.191.569.500,00	2.024.128.500,00	11,13
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	Dinas Perhubungan	7.700.000.000,00	6.432.225.000,00	83,54	6.740.108.000,00	(307.883.000,00)	(4,57)
4	Retribusi Pelayanan Pasar	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	7.250.000.000,00	7.049.267.500,00	97,23	6.892.127.500,00	157.140.000,00	2,28
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan	2.700.480.000,00	2.283.346.500,00	84,55	2.792.293.500,00	(508.947.000,00)	(18,23)
6	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	61.300.000,00	118.090.000,00	192,64	58.880.000,00	59.210.000,00	100,56
7	Retribusi Pengolahan Limbah Cair	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	241.125.000,00	317.811.275,00	131,80	288.775.000,00	29.036.275,00	10,05
8	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	0,00	231.181.300,00	0,00	215.215.800,00	15.965.500,00	7,42
B	Retribusi Jasa Usaha		6.471.500.000,00	6.587.603.061,00	101,79	5.297.515.955,00	1.290.087.106,00	24,35
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	BKAD, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, DPUPR	1.571.500.000,00	1.629.193.425,00	103,67	1.726.774.855,00	(97.581.430,00)	(5,65)

No	Jenis Penerimaan	OPD Teknis	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022	Selisih Realisasi Tahun 2023 dan 2022	% Selisih dibanding Realisasi 2022
			Anggaran	Realisasi	%			
2	Retribusi Terminal	Dinas Perhubungan	0,00	0,00	0,00	147.545.000,00	(147.545.000,00)	(100,00)
3	Retribusi Tempat Khusus Parkir	Dinas Perhubungan	4.400.000.000,00	4.259.361.536,00	96,80	2.874.655.000,00	1.384.706.536,00	48,17
4	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	450.000.000,00	699.048.100,00	155,34	548.541.100,00	150.507.000,00	27,44
5	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Retribusi Perizinan Tertentu		13.189.060.400,00	6.176.120.247,00	46,83	731.408.500,00	5.444.711.747,00	744,41
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	Dinas Tenaga Kerja dan Penanaman Modal	13.000.000.000,00	5.710.940.247,00	43,93	693.858.500,00	5.017.081.747,00	723,07
2	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan	100.000.000,00	450.750.000,00	450,75	20.000.000,00	430.750.000,00	2.153,75
3	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	Dinas Tenaga Kerja dan Penanaman Modal,	89.060.400,00	14.430.000,00	16,20	17.550.000,00	(3.120.000,00)	(17,78)
	Jumlah		55.019.090.400,00	49.774.180.383,00	90,47	41.460.096.255,00	8.314.084.128,00	20,05

Pencapaian retribusi daerah sebesar Rp49.774.180.383,00 dari anggaran sebesar Rp55.019.090.400,00 atau sebesar 90,47% disebabkan adanya pelampauan target pada retribusi jasa umum, pelampauan target pada retribusi jasa usaha, dan tidak tercapainya target retribusi perizinan tertentu.

Pencapaian retribusi jasa umum sebesar Rp37.010.457.075,00 dari anggaran sebesar Rp35.358.530.000 atau sebesar 104,67%. Adapun penjelasan retribusi jasa umum adalah sebagai berikut:

1. Pelampauan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan tahun 2023 sebesar 118,92% disebabkan karena retribusi kebersihan naik karena penyesuaian tarif dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021.
2. Pelampauan retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus tahun 2023 sebesar 192,64% disebabkan karena banyak yang menyewa mobil toilet karena pandemi COVID-19 sudah berakhir.
3. Pelampauan retribusi pengolahan limbah cair tahun 2023 sebesar 131,80% disebabkan karena adanya perubahan tarif yang sebelumnya berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum untuk retribusi pengolahan limbah cair dikenakan Rp15.000,00 per tangki, yang setelah itu di berlakukannya Perda Retribusi Jasa Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2015 tentang retribusi jasa umum. Tarif pengolahan limbah cair dikenakan Rp25.000,00 per m³.

4. Pelampauan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang disebabkan karena adanya pengawasan terhadap alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) sehingga meningkatnya kesadaran Wajib Tera Ulang untuk melakukan tera ulang UTTP.

Pencapaian Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp6.587.603.061,00 dari anggaran sebesar Rp6.471.500.000,00 atau sebesar 101,79%. Adapun penjelasan Retribusi Jasa Usaha sebagai berikut:

1. Pelampauan retribusi tempat rekreasi dan olahraga tahun 2023 sebesar 155,34% karena kesadaran masyarakat untuk berolahraga semakin tinggi karena pandemi covid-19 sudah berakhir.
2. Retribusi penjualan produksi usaha daerah tahun 2023 belum mencapai target sebesar 0,00% disebabkan karena menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK Tahun 2021 dimana pemungutan retribusi tidak memiliki dasar hukum dan sampai sekarang perda tentang pemungutan retribusi penjualan usaha daerah yaitu penjualan benih ikan belum disahkan. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK Tahun 2021 atas pengelolaan pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah berupa penjualan benih ikan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang belum mempunyai dasar untuk penentuan retribusinya, sehingga sejak bulan Mei 2021 tidak dilakukan kegiatan penjualan benih ikan sehingga target tahun 2022 tidak terpenuhi.

Retribusi Perizinan Tertentu sebesar sebesar Rp6.176.120.247,00 dari anggaran sebesar Rp13.189.060.400,00 atau sebesar 46,83%. Adapun rinciannya sebagai berikut:

1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan tahun 2023 belum mencapai target atau sebesar 43,93% disebabkan karena masih menggunakan peraturan daerah yang lama. Kenaikan retribusi izin mendirikan bangunan sebesar 723,39% dibandingkan dengan tahun 2022 disebabkan karena aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) sudah berjalan dengan baik.
2. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol tahun 2023 melampaui target pendapatan sebesar 450,75% karena adanya pelonggaran pengurusan Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (ITPBM). kenaikan retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol sebesar 2153,75% dari tahun 2022 disebabkan karena banyak pengusaha melakukan pengurusan ijin tempat minuman beralkohol.
3. Retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum tahun 2023 belum mencapai target atau sebesar 16,20% disebabkan karena retribusi trayek terkendala kondisi angkutan kota yang tidak seluruhnya beroperasi dan eksistensinya tersaingi oleh angkutan *online*.

3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

31 Desember 2023	31 Desember 2022
30.267.899.526,91	29.510.003.383,89

Anggaran penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2023 sebesar Rp29.453.299.602,00 dan terealisasi sebesar Rp30.267.899.526,91 atau 102,77% yang apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp757.896.143,02 atau 2,57%. Adapun rincian pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagai berikut.

Tabel 5.1.3 Rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

(dalam rupiah)

No	Jenis Penerimaan	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)—Bank Jatim	5.095.028.363,00	5.767.485.186,91	113,20	5.661.021.907,89
2	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)—BPR Tugu Arta	601.053.997,00	743.197.098,00	123,65	341.012.531,00
3	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)—Perumda Tunas	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)—Perumda Air Minum Tugu Tirta	23.757.217.242,00	23.757.217.242,00	100,00	23.507.968.945,00
	Jumlah	29.453.299.602,00	30.267.899.526,91	102,77	29.510.003.383,89

Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) terdiri dari Dividen Bank Jatim sebesar Rp5.767.485.186,91, dan Dividen BPR Tugu Arta sebesar Rp743.197.098,00 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)—Perumda Air Minum Tugu Tirta sebesar Rp23.757.217.242,00.

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

31 Desember 2023	31 Desember 2022
101.708.917.657,45	99.920.327.134,99

Anggaran penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2023 sebesar Rp83.319.617.859,00 dan terealisasi sebesar Rp101.708.917.657,45 atau 122,07% yang apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 mengalami

kenaikan sebesar Rp1.788.590.522,46 atau 1,79%. Adapun rincian pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagai berikut:

Tabel 5.1.4 Rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

(dalam rupiah)

No	Jenis Penerimaan	Tahun 2023		%	Realisasi Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi		
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	6.530.643.172,00	0,00	286.483.111,00
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	17.400.000.000,00	19.177.512.262,00	110,22	24.650.985.923,00
3	Jasa Giro	7.000.000.000,00	3.509.152.049,85	50,13	3.155.365.220,09
4	Pendapatan Bunga	5.000.000.000,00	6.833.835.616,34	136,68	7.293.698.630,05
5	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	0,00	34.804.500,00	0,00	19.237.500,00
6	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	1.357.786.532,79	0,00	2.431.571.098,66
7	Pendapatan Denda Pajak Daerah	0,00	3.423.133.931,69	0,00	3.982.315.092,07
8	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0,00	15.244.020,00	0,00	0,00
9	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	0,00	595.537.417,38	0,00	317.914.960,79
10	Pendapatan dari Pengembalian	1.000.000.000,00	1.927.288.603,49	192,73	3.856.132.945,67
11	Pendapatan BLUD	52.919.617.859,00	58.280.418.051,91	110,13	53.908.554.053,66
13	Pendapatan Denda Pengakhiran Sewa BMD	0,00	22.561.500,00	0,00	15.018.600,00
14	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0,00	1.000.000,00	0,00	3.050.000,00
	Jumlah	83.319.617.859,00	101.708.917.657,45	122,07	99.920.327.134,99

Pencapaian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp101.708.917.657,45 dari anggaran sebesar Rp83.319.617.859,00 atau sebesar 122,07% disebabkan adanya pelampauan target pada hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan, pelampauan target pada pendapatan bunga, pelampauan target dari pendapatan pengembalian dan pelampauan target dari pendapatan BLUD. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Pelampuan Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan karena adanya Penjualan Tanah untuk Perumahan PNS, dan Banyaknya Perangkat Daerah yang mengajukan Penghapusan Barang Milik Daerah.
2. Pelampuan Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan tahun 2023 sebesar 110,22% karena penambahan sewa BMD dari retribusi sewa terutama untuk kegiatan usaha kecil menengah, kegiatan pendidikan dan lokasi strategis. Selain itu, terdapat penambahan sewa BMD dari retribusi sewa terutama untuk kegiatan usaha kecil menengah, kegiatan pendidikan dan lokasi strategis.

3. Pelampauan Pendapatan Bunga tahun 2023 sebesar 136,68% disebabkan karena adanya tingkat suku bunga yang kompetitif yang diberikan oleh Bank Jatim sebagai penerima investasi.
4. Pelampauan Pendapatan dari Pengembalian tahun 2023 sebesar 192,73% karena adanya pembayaran belanja yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, adanya pengembalian kelebihan belanja hibah meningkat signifikan karena realisasi belanja hibah di entitas penerima hibah tidak terserap optimal.
5. Pelampauan Pendapatan BLUD tahun 2023 sebesar 110,13% karena peningkatan jumlah pasien di RSUD menyebabkan jumlah klaim BPJS meningkat sehingga pendapatan naik sebesar 1,19% dari target. Selain itu, jumlah pasien di Puskesmas meningkat sehingga pendapatan Kapitasi Puskesmas naik rata-rata sebesar 1,08% dari pendapatan kapitasi.

5.1.1.b PENDAPATAN TRANSFER

31 Desember 2023	31 Desember 2022
1.552.647.976.062,00	1.450.405.048.247,00

Jumlah realisasi diatas adalah realisasi Pendapatan Transfer tahun 2023 yang dianggarkan sebesar Rp1.376.097.246.844,00 dan terealisasi sebesar Rp1.552.647.976.062,00 atau 112,83% yang apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp102.242.927.815,00 atau 7,05%, yang terdiri dari:

1) Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

31 Desember 2023	31 Desember 2022
1.233.407.465.441,00	1.164.294.384.628,00

Jumlah tersebut adalah realisasi Dana Perimbangan tahun 2023 yang dianggarkan sebesar Rp1.223.468.228.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.233.407.465.441,00 atau 100,81% yang apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp69.113.080.813,00 atau 5,94% dengan rincian sebagai berikut.

a) Dana Bagi Hasil Pajak

31 Desember 2023	31 Desember 2022
112.450.734.000,00	106.141.341.637,00

Jumlah tersebut adalah realisasi penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak tahun 2023 yang dianggarkan sebesar Rp112.450.734.000,00 dan terealisasi sebesar Rp112.450.734.000,00 atau 100,00% yang apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp6.309.392.363,00 atau 5,94%. Pelampauan target Dana Bagi Hasil Pajak disebabkan oleh tingginya realisasi Dana Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan yang mencapai Rp3.125.698.000,00 atau 100,00% dibanding target pendapatan sebesar Rp3.125.698.000,00, Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25 dan

Pasal 29 wajib pajak orang Pribadi dalam negeri dan PPh. Pasal 21 dengan realisasi sebesar Rp52.945.655.000,00 atau 100% dibanding target pendapatan sebesar Rp52.945.655.000,00, dan DBH Cukai Hasil Tembakau dengan realisasi sebesar Rp56.379.381.000,00 atau 100% dibandingkan dengan target pendapatan sebesar Rp56.379.381.000,00. Adapun rincian Dana Bagi Hasil Pajak adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.5 Rincian Dana Bagi Hasil Pajak – Pusat

(dalam rupiah)

No	Jenis Penerimaan	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	3.125.698.000,00	3.125.698.000,00	100,00	6.376.201.675,00
2	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang Pribadi dalam negeri dan PPh. Pasal 21	52.945.655.000,00	52.945.655.000,00	100,00	60.877.838.012,00
3	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	56.379.381.000,00	56.379.381.000,00	100,00	38.887.301.950,00
	Jumlah	112.450.734.000,00	112.450.734.000,00	100,00	106.141.341.637,00

b) Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam (SDA)

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	49.405.105.218,00	82.278.172.590,00

Jumlah tersebut adalah realisasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA yang dianggarkan pada tahun 2023 sebesar Rp31.984.203.000,00 dan terealisasi sebesar Rp49.405.105.218,00 atau 154,47%. Apabila dibandingkan dengan tahun 2022, realisasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam (SDA) mengalami penurunan sebesar Rp32.873.067.372,00 atau 39,95%. Adapun rincian Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA sebagai berikut:

Tabel 5.1.6 Rincian Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA

(dalam rupiah)

No	Jenis Penerimaan	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	
1	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	27.812.985.000,00	45.233.887.218,00	162,64	72.612.806.873,00
2	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	2.083.438.000,00	2.083.438.000,00	100,00	4.175.690.966,00
3	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	10.437.000,00	10.437.000,00	100,00	46.240.672,00
4	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	0,00	240.645.300,00	0,00	0,00
5	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	687.558.000,00	446.912.700,00	65,00	3.049.142.985,00

No	Jenis Penerimaan	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	
6	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	156.651.000,00	156.651.000,00	100,00	435.980.094,00
7	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.233.134.000,00	1.233.134.000,00	100,00	1.958.311.000,00
	Jumlah	31.984.203.000,00	49.405.105.218,00	154,47	82.278.172.590,00

c) Dana Alokasi Umum (DAU)

31 Desember 2023	31 Desember 2022
826.400.603.605,00	785.673.513.760,00

Jumlah tersebut adalah realisasi penerimaan Dana Alokasi Umum tahun 2023 yang dianggarkan sebesar Rp820.437.393.000,00 dan terealisasi sebesar Rp826.400.603.605,00 atau 100,73%. Dana Alokasi umum apabila dibandingkan dengan tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp40.727.089.845,00 atau 5,18%.

d) Dana Alokasi Khusus (DAK)

31 Desember 2023	31 Desember 2022
245.151.022.618,00	190.201.356.641,00

Jumlah tersebut adalah realisasi penerimaan Dana Alokasi Khusus tahun 2023 yang dianggarkan sebesar Rp258.595.898.000,00 dan terealisasi sebesar Rp245.151.022.618,00 atau 94,80%, apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp54.949.665.977,00 atau 28,89%. Realisasi penerimaan Dana Alokasi Khusus kurang dari anggaran yang ditetapkan pada DAK Fisik yang terealisasi sebesar Rp15.967.259.384,00 atau 85,13% dari anggaran sebesar Rp18.755.225.000,00, dan DAK Non Fisik yang terealisasi sebesar Rp229.183.763.234,00 atau 95,56% dari anggaran sebesar Rp239.840.673.000,00.

Adapun rincian realisasi Dana Alokasi Khusus Pusat adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.7 Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) – Pusat

(dalam rupiah)

No	Jenis Penerimaan	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	
A	DAK Fisik	18.755.225.000,00	15.967.259.384,00	85,13	13.614.853.380,00
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	495.000.000,00	487.036.470,00	98,39	0,00
2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	3.452.216.000,00	2.623.643.600,00	76,00	951.760.000,00

No	Jenis Penerimaan	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	
3	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	1.797.912.000,00	1.355.608.600,00	75,40	0,00
4	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	0,00	0,00	0,00	1.005.294.413,00
5	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	0,00	0,00	0,00	86.158.000,00
6	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	0,00	0,00	0,00	1.189.470.000,00
7	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	6.177.926.000,00	0,00	0,00	3.612.100.000,00
8	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	0,00	6.131.600.000,00	0,00	0,00
9	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penurunan AKI dan AKB	6.387.956.000,00	0,00	0,00	0,00
10	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Percepatan Penurunan Stunting	0,00	4.989.134.000,00	0,00	88.500.000,00
11	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit	110.438.000,00	108.900.000,00	98,61	3.977.839.208,00
12	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	333.777.000,00	271.336.714,00	81,29	2.703.731.759,00
B	DAK Non-Fisik	239.840.673.000,00	229.183.763.234,00	95,56	176.586.503.261,00
1	DAK Non Fisik-BOS Reguler	98.158.400.000,00	97.330.908.524,00	99,16	67.106.609.741,00
2	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	5.287.500.000,00	5.207.500.000,00	98,49	60.000.000,00
3	DAK Non Fisik-TPG PNSD	90.410.676.000,00	90.037.191.574,00	99,59	81.408.120.665,00
4	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	4.752.500.000,00	2.947.756.999,00	62,03	1.808.400.000,00
5	DAK Non Fisik-BOP PAUD	14.953.800.000,00	14.538.023.790,00	97,22	13.550.833.000,00
6	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	3.737.800.000,00	3.721.450.000,00	99,56	3.379.200.000,00
7	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	1.400.000.000,00	1.374.099.350,00	98,15	1.288.433.000,00
8	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	7.905.954.000,00	13.136.415.765,00	166,16	1.147.743.839,00
9	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	692.784.000,00	0,00	0,00	0,00
10	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	5.312.866.000,00	0,00	0,00	0,00
11	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	6.206.838.000,00	0,00	0,00	5.380.525.660,00
12	DAK Non Fisik-PK2UKM	420.370.000,00	0,00	0,00	389.836.500,00
13	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisata	0,00	0,00	0,00	698.232.000,00
14	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	263.110.000,00	244.913.432,00	93,08	180.383.856,00
15	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	338.075.000,00	229.895.000,00	68,00	188.185.000,00

No	Jenis Penerimaan	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	
16	DAK Non Fisik-PK2UMK	0,00	415.608.800,00	0,00	0,00
	Jumlah	258.595.898.000,00	245.151.022.618,00	94,80	190.201.356.641,00

Pemerintah Kota Malang mendapatkan alokasi DAK yang terdiri atas DAK fisik dengan alokasi sebesar Rp15.967.259.384,00 dan DAK non fisik dengan alokasi sebesar Rp229.183.763.234,00 sehingga total alokasi DAK untuk Pemerintah Kota Malang TA 2023 adalah sebesar Rp245.151.022.618,00.

2) Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

31 Desember 2023	31 Desember 2022
22.160.938.000,00	40.048.548.000,00

Jumlah tersebut adalah realisasi penerimaan Dana Penyesuaian tahun 2023 yang dianggarkan sebesar Rp22.160.938.000,00 dan terealisasi sebesar Rp22.160.938.000,00 atau 100%. Adapun rincian Transfer Pemerintah Pusat Lainnya adalah sebagai berikut.

Tabel 5.1.8 Rincian Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - Pusat

(dalam rupiah)

No	Jenis Penerimaan	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Dana Insentif Daerah	22.160.938.000,00	22.160.938.000,00	100,00	40.048.548.000,00
	Jumlah	22.160.938.000,00	22.160.938.000,00	100,00	40.048.548.000,00

3) Transfer Pemerintah Provinsi

31 Desember 2023	31 Desember 2022
297.079.572.621,00	246.062.115.619,00

Jumlah tersebut adalah realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi tahun 2023 yang dianggarkan sebesar Rp130.468.080.844,00 dan terealisasi sebesar Rp297.079.572.621,00 atau 227,70% yang apabila dibandingkan realisasi tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp51.017.457.002,00 atau 20,73% yang terdiri atas:

a) Pendapatan Bagi Hasil Pajak

31 Desember 2023	31 Desember 2022
294.217.582.000,00	232.954.723.619,00

Jumlah tersebut adalah realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak tahun 2023 yang dianggarkan sebesar Rp127.606.090.223,00 atau terealisasi sebesar Rp294.217.582.000,00 atau 230,57% sedangkan selisih dengan tahun 2022 yang mengalami kenaikan sebesar Rp61.262.858.381,00 atau 26,30%.

Tabel 5.1.9 Rincian Pendapatan Bagi Hasil Pajak – Provinsi**(dalam rupiah)**

No	Jenis Penerimaan	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	42.003.478.185,00	96.865.029.800,00	230,61	83.823.466.600,00
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	15.869.672.776,00	57.983.710.100,00	365,37	48.277.485.020,00
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	28.993.492.516,00	77.378.293.000,00	266,88	48.337.690.240,00
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	120.809.746,00	375.406.500,00	310,74	271.624.800,00
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	40.618.637.000,00	61.615.142.600,00	151,69	52.244.456.959,00
	Jumlah	127.606.090.223,00	294.217.582.000,00	230,57	232.954.723.619,00

b) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi

31 Desember 2023	31 Desember 2022
2.861.990.621,00	13.107.392.000,00

Jumlah tersebut adalah bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Timur tahun 2023 yang dianggarkan sebesar Rp2.861.990.621,00 dan terealisasi sebesar Rp2.861.990.621,00 atau 100,00% yang apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp10.245.401.379,00 atau 78,17%. Rinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.10 Rincian Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi**(dalam rupiah)**

No	Jenis Penerimaan	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	2.861.990.621,00	2.861.990.621,00	100,00	13.107.392.000,00
	Jumlah	2.861.990.621,00	2.861.990.621,00	100,00	13.107.392.000,00

Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Tahun 2023 meliputi Bidang Kesehatan dan Bidang Pendidikan. Berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor : 440/810/102.1/2023 tanggal: 12 Januari 2023, Pagu Anggaran Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Bidang Kesehatan sebesar Rp154.860.621,00 untuk kegiatan Pendampingan Penyelenggaraan Pesantren Sehat sebesar Rp35.383.621,00, dan Pendampingan Ibu Hamil KEK oleh Kader dalam Pencegahan Stunting (Bunda Anak Impian/BUAIAN) sebesar Rp119.477.000,00. Sedangkan, Berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor: 045.2/1010/201.4/2023 tanggal: 13 Februari 2023, Pagu Anggaran Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Bidang Pendidikan kepada Pemerintah Kota Malang sebesar Rp2.707.130.000,00 untuk kegiatan Bantuan

Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS) selama 6 Bulan sebesar Rp2.493.930.000,00, Pemenuhan Honorarium Kinerja Kepala/Guru TK/PAUD Non PNS selama 6 bulan Rp 163.200.000,00, dan Pemenuhan Honorarium Kinerja Guru Non PNS Jenjang TK/SD/SMP selama 10 bulan sebesar Rp50.000.000,00.

5.1.1.c LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

31 Desember 2023	31 Desember 2022
47.955.997,64	3.011.115.493,50

Jumlah realisasi diatas adalah realisasi penerimaan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah tahun 2023 yang dianggarkan sebesar Rp0,00 dan terealisasi sebesar Rp47.955.997,64 yang apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp2.963.159.495,86 atau 98,41%.

1) Pendapatan Hibah

31 Desember 2023	31 Desember 2022
47.947.248,64	2.548.416.685,75

Jumlah tersebut adalah realisasi Pendapatan Hibah dari sumbangan pihak ketiga/sejenis sebesar Rp47.947.248,64. Rincian disajikan sebagai berikut.

Tabel 5.1.11 Rincian Pendapatan Hibah

(dalam rupiah)

No	Jenis Penerimaan	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	2.106.000.000,00
2	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	0,00	47.947.248,64	0,00	442.416.685,75
	Jumlah	0,00	47.947.248,64	0,00	2.548.416.685,75

Pendapatan hibah dari sumbangan pihak ketiga/sejenis sebesar Rp47.947.248,64 merupakan pos untuk menampung pendapatan yang tidak diketahui dengan jelas pihak penyetornya.

2) Pendapatan Lainnya

31 Desember 2023	31 Desember 2022
8.749,00	462.698.807,75

Jumlah tersebut adalah realisasi Pendapatan Lainnya tahun 2023 yang terealisasi sebesar Rp8.749,00 yang apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp462.690.058,75 atau 100,00%. Rincian disajikan sebagai berikut.

Tabel 5.1.12 Rincian Pendapatan Lainnya**(dalam rupiah)**

No	Jenis Penerimaan	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Pemerintah	0,00	0,00	0,00	447.273.557,75
2	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan hukum Indonesia	0,00	8.749,00	0,00	15.425.250,00
	Jumlah	0,00	8.749,00	0,00	462.698.807,75

Pendapatan atas pengembalian hibah pada badan, Lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia meliputi pengembalian sisa dana hibah PMI Tahun 2022 sebesar Rp8.749,00.

5.1.2. BELANJA

31 Desember 2023	31 Desember 2022
2.596.706.284.209,93	2.188.318.745.870,33

Belanja Daerah Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp2.596.706.284.209,93 dari anggaran sebesar Rp2.829.655.226.955,00 atau terealisasi 91,77% yang apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp408.387.538.339,60 atau 18,66% yang terdiri atas:

5.1.2.a BELANJA OPERASI

31 Desember 2023	31 Desember 2022
2.188.051.811.802,93	1.871.107.791.922,33

Belanja Operasi Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp2.378.902.724.215,00 dan terealisasi sebesar Rp2.188.051.811.802,93 atau 91,98% yang apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp316.944.019.880,60 atau 16,94% dengan rincian sebagai berikut.

1) Belanja Pegawai

31 Desember 2023	31 Desember 2022
834.812.187.648,13	805.321.434.867,47

Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp935.902.814.123,00 dan terealisasi sebesar Rp834.812.187.648,13 atau 89,20% Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp29.490.752.780,66 atau 3,66%.